



**LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI**  
**Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian**  
**Pemberdayaan Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana**  
**(BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

---

|                  |  |
|------------------|--|
| Tahun Sidang     | : 2015-2016  |
| Masa Persidangan | : III  |
| Rapat ke         | : --   |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat  |
| Sifat rapat      | : Terbuka  |
| Hari/tanggal     | : Selasa, 21 April 2015  |
| Waktu            | : 10.00 – 13.00 WIB  |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)  |
| Rapat dengan     | : Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI   |
| Acara            | : Tentang Program Keluarga Harapan, Dukungan Anggaran, Data Persebaran, Dampak/implikasi serta Permasalahan yang dihadapi. |
| iKetua Rapat     | : <b>Dr. H. Deding Ishak, SH., MH.</b>   |
| Sekretaris Rapat | : Yanto Supriyanto,SH  |
| Hadir            | : 38 Anggota dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI  |

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Selasa, 21 April 2015 dibuka pukul 10.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Bpk. **Dr. H. Deding Ishak, SH., MH.**, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat kepada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI serta berbagai hal yang terkait dengan Program Keluarga Harapan, Dukungan Anggaran, Data Persebaran, Dampak/implikasi serta Permasalahan yang dihadapi.

### II. PEMBAHASAN

- I. Pendahuluan
- II. Realisasi Program Keluarga Harapan
- III. Penutup

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI Dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI dengan agenda : "Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH), Dukungan Anggaran, Data Pesebaran, Serta Permasalahan Yang Dihadapi", dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami penjelasan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, tentang Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH), Dukungan Anggaran, Data Pesebaran, Serta Permasalahan Yang Dihadapinya.
2. Dalam rangka meningkatkan dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pengurangan kemiskinan, Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI agar dalam pelaksanaan PKH memperhatikan sungguh-sungguh rekomendasi Anggota Komisi VIII DPR RI, antara lain:
  - a. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang disusun harus berdasarkan pada akurasi data penerima yang menjadi sasaran program dan kegiatan dengan memperhatikan target RPJM 2015-2019 sebanyak 4.900.000 Keluarga Sangat Miskin (KSM).
  - b. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2015 sebelum direalisasikan harus dilakukan perbaikan data melalui verifikasi dan divalidasi yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI.
  - c. Meningkatkan persebaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dengan penambahan target di kecamatan dan penambahan target di kabupaten.
  - d. Meningkatkan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat luas dan meningkatkan sinergi dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
  - e. Mensinergikan mekanisme kerja pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pendamping program-program terkait lainnya di lingkungan kementerian/lembaga namun tetap memperhatikan karakteristik sasaran penerima program masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dan agar lebih efektif.
  - f. Memastikan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) mampu merubah pola pikir (*mindset*) penerima manfaat PKH dengan mempercepat program *family development session* pada tahun ke-2.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI untuk melakukan workshop, kajian dan evaluasi mengenai efektifitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, hasilnya disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 21 April 2015

AN.KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO  
NIP. 196305241992031001